

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini akan membahas tentang Kebijakan serta strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak dalam pengelolaan dan upaya meningkatkan investasi asing di wilayahnya.

Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing¹.

Secara garis besar, investasi asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima. Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, investasi asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan investasi asing

¹ Dumairy, 1996, "Perekonomian Indonesia", Erlangga, Jakarta.

menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya investasi asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.

Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha. Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional.

Dengan masuknya investasi asing, pemerintah dapat melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut diantaranya perbaikan infrastruktur. Modal pembangunan infrastruktur tersebut diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak tersebut diperoleh dari deviden dan bunga obligasi yang yang diterima oleh investor asing yang melakukan investasi di Indonesia baik investasinya secara langsung maupun investasi tidak langsung yaitu berupa penanaman saham korporasi, surat obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Besarnya pajak yang sudah diatur pemerintah tersebut akan masuk ke APBN dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jika infrastruktur di Indonesia baik maka akan berpengaruh pada mudahnya akses industri di Indonesia. Jika infrastruktur

baik, dan industri Indonesia mendapatkan modal yang cukup sehingga mampu memproduksi barang sesuai permintaan konsumen.

Investasi asing atau penanaman modal asing sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Investasi asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya yang permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Demak Tahun 2012 sebesar 4,64% dengan laju inflasi 5,11% angka pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari tahun 2011 yang sebesar 4,48% dengan inflasi 5,14% namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang sebesar 6,34 dan pertumbuhan ekonomi nasional 6,23 sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak masih perlu didorong lagi sehingga bisa mendekati tingkat pertumbuhan ekonomi

Propinsi maupun Nasional. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak cenderung bertambah walaupun pertumbuhannya tidak terlalu besar². Hal ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat Kabupaten Demak memiliki sumber daya yang cukup baik dan masih memungkinkan untuk diolah dengan lebih optimal lagi, prasarana penunjang relatif sama dibanding dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, bahkan letak geografis Kabupaten Demak berada di tengah yang dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Kabupaten Demak mempunyai luas wilayah 89.743 ha dengan jarak bentangan Utara ke Selatan 41 km dan Timur ke Barat 49 km dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, terletak di jalan pantura sebelah barat di batasi dengan wilayah kodya Semarang, sebelah timur di batasi dengan kabupaten Kudus, sebelah utara di batasi dengan wilayah kabupaten Jepara sebelah selatan di batasi daerah wilayah kabupaten grobogan dan kabupaten Semarang, merupakan salah satu kabupaten yang cukup potensial di wilayah Jawa Tengah, ditinjau dari kerangka makro dan juga letak geografis yang strategis. Selain itu juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, karena merupakan daerah yang memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perikanan yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Potensi inilah yang perlu dikembangkan dengan menambah segala daya kemampuan dan kemauan baik dari segi modal maupun ketenagakerjaan, khususnya produktivitas dan kesempatan kerja bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

² Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013, Tanggal 11 Desember 2013

Dalam hal untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Demak dibutuhkan peran serta penanaman modal asing yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan penanaman modal asing.

Motif yang mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif non strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Beberapa hal yang termasuk dalam motif strategis adalah usaha mencari pasar, mencari bahan baku dan mencari efisiensi produksi³.

Dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan 2010 penanaman modal di Kabupaten Demak mengalami pasang surut dikarenakan berbagai kondisi perekonomian antara lain krisis ekonomi pada tahun 1998 yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Demak saja tetapi juga dirasakan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Tahun 1998 menjadi titik terendah tingkat investasi Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi yaitu inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi serta ketidakstabilan politik telah memicu pelarian modal (*Capital Outflow*) dalam skala yang cukup tinggi hingga mencapai US\$ 20 milyar. Ketidakstabilan tersebut juga mengakibatkan banyak pengusaha meninggalkan Indonesia, terhambatnya jaringan distribusi nasional, terputusnya pembiayaan luar negeri dan ditanguhkannya banyak rencana investasi di Indonesia.

³ Sadono Sukirno, 2000, "Pengantar Teori Makro Ekonomi", Rajawali Press, Jakarta. Hal 35

Sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Demak semakin fokus membangun daerahnya dengan mengundang investor untuk menanamkan modalnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa investor asing dan investor dalam negeri yang menanamkan modalnya melalui beberapa sektor industri, seperti industri kayu, tekstile, manufaktur dan sebagainya. Bahkan, kini banyak pengusaha yang mencari lahan ratusan hektare untuk memenuhi tujuan usaha mereka. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak telah banyak melakukan persiapan untuk bisa mensikapi potensi investasi ini dengan regulasi yang memadai, agar jangan sampai investasi tersebut justru merugikan daerah.

B. Tujuan Tesis

1. Tesis ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai investasi asing dengan melakukan pembahasan mengenai latar belakang perkembangan investasi asing serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh. Fokus studi tesis ini adalah salah satu aspek manfaat, tujuan dan alasan kebijakan investasi asing yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak dalam pengelolaan kerjasama internasional.
2. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
3. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dan menuangkannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan, menjelaskan dan memprediksi fenomena yang ada.
4. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, gambaran dan tambahan informasi bagi para peminat maupun peneliti lain, serta para mahasiswa ilmu Hubungan Internasional maupun mahasiswa Fakultas Ilmu Politik lainnya yang hendak melaksanakan penelitian tentang Investasi Asing di Kabupaten Demak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, pengambilan kebijakan dan keputusan di bidang pembangunan perekonomian dan pengembangan wilayah, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kebijakan investasi asing yang dilakukukan Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan investasi asing pada tahun 2011-2014?

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Pheni Chalid, penerapan otonomi daerah dewasa ini memberikan prospek yang menggairahkan bagi aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, dimana keduanya memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berarti, *pertama*, terbukanya lapangan pekerjaan bagi

masyarakat daerah akan berkorelasi positif dengan peningkatan penduduk; *kedua*, mendorong peningkatan pendapatan pada sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Ukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan pemanfaatan sumberdaya di daerah yang dilakukan lebih optimal sehingga memotivasi proses pertukaran produksi lintas daerah maupun lintas sektor.⁴ Oleh karena itu investasi asing menjadi isu penting bagi daerah-daerah pasca penerapan otonomi daerah di Indonesia, daerah berkompetisi untuk menggunakan segala potensi sebagai bagian dari proses untuk menarik investasi asing ke daerahnya.

Adapun beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai Investasi Asing antara lain, pernah dilakukan oleh Alfian Wahyu Fauzan dalam karya tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Dalam karya tulis tersebut menjelaskan bahwa investasi asing sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Semakin tinggi realisasi investasi, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Dalam penelitian yang dilakukan Miftakhul Saleh yang berjudul “Analisis Efisiensi Pertambahan Investasi Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2013, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangaat berperan dalam menentukan

⁴ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*, Jakarta, Kemitraan Partnership, 2005, hal 108-109

pertumbuhan Investasi dimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan mempunyai andil untuk menentukan bagaimana formulasi pengelolaan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan Investasi Asing.

Dalam penelitian lain mengenai implementasi diadakannya diplomasi investasi asing yang dilakukan oleh Romayati Apriliani dalam artikelnya yang berjudul “Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam tata ekonomi dunia yaitu keunggulan posisi geostrategis, karena letaknya di pusat daya tarik baru perekonomian global dimana Indonesia berkesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik, keunggulan dan kekayaan sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, keberadaan struktur sumber daya manusia usia produktif dan iklim yang relatif bersahabat, selayaknya potensi dengan berbagai macam keunggulan ini dapat bersinergi dengan kinerja pemerintah dari pusat hingga daerah untuk dapat memetakan dan mengeksekusi keunggulan-keunggulan ini menjadi sebuah keuntungan yang nyata untuk daerah.⁵

Salah satu dari potensi investasi di Indonesia berada di Propinsi Kepulauan Riau, di wilayah tersebut terdapat lebih dari 1500 perusahaan asing yang beroperasi di Propinsi Kepulauan Riau, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional dari Singapura, Amerika Serikat, United Kingdom, Uni Emirat

⁵ Romayati Apriliani, Artikel Jurnal JOM FISIP Vol.2, No.1 Universitas Riau: Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”), Riau, Universitas Riau, 2012.

Arab, Malaysia, Jerman, dan negara-negara lainnya. Secara resmi Presiden Republik Indonesia pada 19 Januari 2009 telah meluncurkan Batam-Bintang-Karimun sebagai *Free Trade Zone* untuk menarik lebih banyak lagi investor-investor internasional ke Propinsi Kepulauan Riau.⁶

Menanggapi hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian mengenai kebijakan investasi asing di Kabupaten Demak. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian atau tulisan yang secara khusus membahas tentang kebijakan investasi asing di Kabupaten Demak belum ada, namun ada beberapa artikel dan referensi tulisan mengenai bentuk potensi investasi asing dan tulisan mengenai dampak investasi asing di Jawa Tengah, dan belum ada yang membahas secara khusus mengenai kebijakan investasi asing di Kabupaten Demak. Dari beberapa artikel dan tulisan atau karya ilmiah tersebut dapat digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

M. Khairin Majid (2013) dalam jurnalnya mengatakan untuk kembali menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengambil kebijakan ekonomi dengan melakukan pinjaman terhadap negara atau lembaga-lembaga keuangan internasional.⁷ Arus masuk modal asing (*capital inflows*) juga berperan dalam menutup devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Modal

⁶ Ibid.,

⁷ Majid, M. Khairin. 2013. *Analisis pengaruh utang luar negeri (ULN) dan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 1986-2011*. Malang : Universitas Brawijaya.

asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh D.Fischer dan M.Stater yang membahas tentang investasi asing di Tiongkok, mereka menyatakan bahwa sasaran utama yang mendasari kebijakan Tiongkok untuk membuka diri dengan dunia luar dan membolehkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing untuk mengimpor teknologi maju dan keahlian managerial serta menarik dana-dana asing. Dalam melakukan hal ini RRT dapat mengembangkan kualitas produk mereka sendiri, meningkatkan kapasitas mereka dan mempercepat modernisasi.⁸

Sedangkan Takdir Ali Mukti, dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (2013)*, mengatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan internasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama 'kedaulatan' suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan 'share' kedaulatan dalam batas-batas konstitusionalnya.⁹ Inilah geliat lokal dalam ranah global yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing menuju era globalisasi yang penuh

⁸ D.Fischer dan M.Stater, *Direct Investment In The RRT*, dalam A.J Rood an R.W Jagtenberg, *Yearbook Law & Legal Practice In East Asia*. Volume I, 1995, Hal. 53 dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal.1993.

⁹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013

persaingan, tidak hanya Negara tapi juga wilayah setingkat propinsi atau daerah setingkat kabupaten/kota di dalam Negara tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah dimana setiap daerah memiliki wewenang dan kekuasaan lebih dari sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuka Kerjasama Internasional dalam upaya untuk meningkatkan investasi asing dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak asing yang ada. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri akan tetapi membawa nama pemerintah pusat untuk itu Negara sama sekali tidak akan kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah entitas yang sebelumnya memiliki peran dalam pergulatan Internasional.

F. Kerangka Teoritik

1. Investasi Asing

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi asing juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasi¹⁰.

Modal Asing merupakan prasyarat pembangunan, hal ini dapat kita rujuk dari tesis Paul Krugman yang menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing. Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan. Artinya jika suatu negara ingin meraih kembali pertumbuhan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing.¹¹

Menurut Alan M. Rugman ada dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.¹² Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal, teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen (*human capital*). Sedangkan yang disebut sebagai variabel non-ekonomi adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan

¹⁰ Sadono Sukirna, 2000. "Pengantar Teori Makro Ekonomi", Rajawali Press, Jakarta.

¹¹ Sidiq Jatmika, Op. Cit., hal 77

¹² Alan M. Rugman, *International Bussiness: From and Environtment*, (New York: Mc graw Hill Book, 1985). Hal 73-92

yang bersih dan berwibawa pada suatu negara, baik tuan rumah maupun pemerintah dari negara asal penanam modal tersebut.¹³

Sjohlm juga menguatkan pendapat tersebut, dengan menyatakan bahwa faktor stabilitas politik dan kemandirian suatu negara yang paling dipertimbangkan oleh investor asing sebagai keinginan untuk melakukan investasi di wilayah tersebut, teori ini kembali diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah pada tahun 2003 yaitu dengan menyatakan faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktivitas serta infrastruktur fisik merupakan beberapa indikator yang paling berpengaruh terhadap daya tarik investor asing untuk melakukan investasi asing di Indonesia.¹⁴

Keberadaan investasi asing juga memberi manfaat bagi wilayah yang dijadikan tempat berinvestasi. Manfaat tersebut adalah adanya perlindungan politik dan keamanan wilayah, karena bila investor berasal dari Negara dengan tingkat pertahanan, keamanan dan militer yang kuat maka bantuan keamanan juga akan diberikan oleh negara tersebut.¹⁵

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman, Kabupaten Demak tentunya telah memenuhi dua variabel penting yang mempengaruhi datangnya investor asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Kabupaten Demak mempunyai keunggulan spesifik atau faktor lokasi yang sangat

¹³ G.Katosapoetro, *manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 25

¹⁴ Sri Muwarni, *Analisa Kebijakan Moneter Kaitannya Dengan Penanaman Modal Asing* Universitas Diponegoro, Semarang 2007.

¹⁵ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, Hal. 45

strategis, yaitu terletak diantara kota Semarang, Kudus, Jepara, dan juga Grobogan. Sedangkan jika dilihat dari unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah, tentunya Demak pun telah memenuhi kriteria tersebut, mengingat Kabupaten Demak memiliki ketersediaan SDM dalam menyediakan tenaga kerja dan kekayaan sumber daya alam yang utamanya dalam bidang pertanian dan perikanan. Selanjutnya, secara keseluruhan Kabupaten Demak merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia usaha baik yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, perhotelan, pariwisata dan industri lainnya. Kabupaten Demak merupakan daerah otonom yang mempunyai banyak keunggulan serta potensi dan beberapa faktor economic opportunity yang mungkin dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya seperti : masih rendahnya upah buruh di kabupaten Demak, tersedianya beberapa lokasi yang sangat strategis bila didirikan pabrik, dan merupakan daerah yang relatif aman dan kondusif dengan kondisi politik yang relatif stabil.

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditemukan adanya hubungan yang sangat menguntungkan oleh kedua belah pihak, yaitu investor itu sendiri dan juga daerah yang dijadikan tempat investasi, sehingga peningkatan investasi asing di daerah selayaknya patut diperjuangkan.

2. Paradiplomasi

Konsep diplomasi secara tradisional yang merupakan ranah milik pemerintah pusat saat ini mengalami pergeseran, dengan masuknya berbagai aktor baru yang juga memainkan peran diplomasi. Saat ini, sudah merupakan hal yang

jamak bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang memiliki peran dalam hubungan antar negara, namun dalam beberapa segi, pemerintah daerah dari berbagai negara juga berperan dalam hubungan internasional.

Munculnya aktor baru bernama pemerintah daerah mempengaruhi perkembangan hubungan yang bersifat transnasional.¹⁶ Diplomasi dengan aktor pemerintah daerah disebut sebagai *paradiplomacy*. Penyebutan *paradiplomacy* ini menunjuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh entitas sub-negara, yang dijalankan di arena internasional untuk tujuan tertentu. Dalam menjalankan diplomasi, aktor sub-nasional ini dapat mendirikan perwakilan dan memiliki kontak formal maupun informal, permanen maupun *ad hoc*, dengan entitas pemerintah maupun swasta asing, dengan tujuan memajukan kepentingan sosial ekonomi atau politik maupun dimensi kepentingan lainnya, yang sesuai dengan amanat konstitusional atau kompetensi yang dimilikinya. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa aktivitas atau lapisan *paradiplomacy* meliputi tiga bidang yaitu politik, ekonomi dan budaya yang saling berkaitan.¹⁷

Secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi Saldatos (1990), membagi dia tipe paradiplomasi. Tipe pertama adalah *global paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Mengingat pemerintah sub nasional

¹⁶ Sidiq jatmika, *Otonomi daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta. 2001. Hal. 54

¹⁷ Stefan Wolff, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf. Diakses pada 10 September 2015

biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi. Tipe yang kedua adalah *regional paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (*geographical contiguity*), Saldos menyebutnya sebagai *microregional paradiplomacy* sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Lazimnya *regional paradiplomacy* ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi.¹⁸

Sedangkan Duchacek menjelaskan paradiplomasi dibagi menjadi tiga tipe. Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*. Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupun informal oleh pemerintah sub nasional yang berada negara namun berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah. Tipe yang kedua adalah *transregional paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun negara dimana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berbatasan langsung dalam satu kawasan. Tipe yang ketiga adalah *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia.

¹⁸ Stivani Ismawira “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta . 2013

Dalam era tanpa batas ini maka keberadaan paradiplomasi menjadi fenomena yang kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non negara dalam arena hubungan internasional. Motivasi terkuat yang melatarbelakangi munculnya keinginan daerah untuk melakukan kegiatan diplomasi adalah faktor ekonomi. Tujuan daerah untuk melakukan *paradiplomacy* dalam hal ini adalah untuk menarik investasi asing, menarik perusahaan multinasional ke wilayahnya, dan menargetkan pasar ekspor baru. Fungsinya tertuju semata untuk berkompetisi di tingkat global, sehingga tidak memiliki faktor politik sama sekali.

Lapisan kedua melibatkan kerja sama (budaya, pendidikan, teknik, dan lain sebagainya). Dalam hal ini, *paradiplomacy* lebih luas cakupannya dan lebih multidimensi, karena tidak hanya berfokus pada perolehan ekonomi. Sementara lapisan ketiga melibatkan segi politik, dimana *paradiplomacy* lebih menengahkan identitas yang berbeda dari identitas yang dimunculkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, daerah berupaya membentuk serangkaian hubungan internasional yang akan menegaskan kekhususan (*distinctiveness*) budaya, otonomi politik dan karakter bangsa atau sub-nasional masyarakat yang mereka wakili.¹⁹ Namun, patut dicatat bahwa seluruh kegiatan *paradiplomacy* memiliki komponen ekonomi, dengan penambahan elemen-elemen lain seperti kerja sama maupun menjurus ke politik.

¹⁹ André Lecours, *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. Dalam Nia Sutedja "Paradiplomacy dalam Lingkaran Politik Luar Negeri Indonesia". 2014.

3. Kebijakan Publik

Menurut R. Dye (1995) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *what government do, why they do it, and what different it makes*. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a project program of goals, values, and practices*. David Easton (1965) mendefinisikan sebagai *the impact of government activity*²⁰. Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. “Dikerjakan” atau “tidak dikerjakan” merupakan keputusan, karena dilakukan tetap akan memberikan dampak.

Dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan Bahwa Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Jika kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye terdapat tiga elemen kebijakan pembentuk sebuah sistem

²⁰ Nugroho, “Kebijakan Publik” 2006, hal 23-24

yaitu *public policy*, pelaku kebijakan / *policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan / *policy environment*. Ketiga elemen tersebut saling mempengaruhi, sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.²¹

Jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/ propinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Andrew Lee dan Maurice Sunkin (2003) menjelaskan bahwa undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik.²² Pernyataan Suer dan Sunkin tersebut mendapat penegasan bahwa kebijakan tanpa undang-undang tidak memiliki kekuasaan untuk diimplementasikan.²³

Dalam rangka meningkatkan investasi asing, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan investasi yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini pada intinya bertujuan untuk; meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,

²¹ William N Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 111.

²² Andrew Lee Suer, Maurice Sunkin, 2003, dalam Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Jakarta. Hal. 74

²³ Ibid. Hal. 74

meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Sesuai dengan tuntutan akan peningkatan investasi asing tentunya harus ada peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, yaitu dengan perubahan unit pelayanan penanaman modal yang semula bernama UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) maka bentuk kelembagaannya ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak ditingkatkan kelembagaannya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM).

Dengan mendirikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTM) Pemerintah Kabupaten Demak dapat meningkatkan iklim usaha dengan menciptakan pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan mutu pelayanan satu titik (*one stop service*) dengan membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan).

²⁴ UU RI nomor 25 Tahun 2007

Dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi para investor, Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan kebijakan-kebijakan untuk menarik investor asing di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 3 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan penanaman modal seperti: kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

G. Hipotesis :

Berdasarkan uraian pada kerangka teori di atas maka penulis dapat membuat kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu dalam meningkatkan investasi asing di wilayahnya Pemerintah Kabupaten Demak melakukan kebijakan dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yaitu dengan mendirikan badan khusus pelayanan perizinan dan penanaman modal BPPTPM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal). Yang kedua, Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan kebijakan-kebijakan penanaman modal seperti: kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 Tahun 2014 tentang penanaman modal.

H. Metodologi Penelitian

[1].Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kebijakan dan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak dengan pihak asing melalui diplomasi ataupun cara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan untuk mengetahui peluang serta tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

[2].Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Demak dengan pertimbangan bahwa yang diteliti yaitu Kebijakan dan Strategi pengelolaan Investasi Asing Pemerintah Kabupaten Demak.

Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai kebijakan investasi asing di Kabupaten demak, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini, jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2011-2015.

[3].Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :
 - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- b. Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui :
 - a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yaitu diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

[4]. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dinamika Investasi Asing di Kabupaten Demak. Bab ini berisi perkembangan investasi asing di Kabupaten Demak, gambaran umum serta potensi dan hambatan investasi asing di Kabupaten Demak.

BAB III : BPPTPM Dalam Investasi Asing di Kabupaten Demak. Bab ini membahas tentang latar belakang berdirinya BPPTPM, visi dan misi, tujuan dan sasaran, peran, tugas, fungsi dan struktur organisasi, tantangan dan peluang BPPTPM dan investasi asing.

BAB IV : Kebijakan Peningkatan Investasi Asing di Kabupaten Demak. Bab ini akan membahas tentang strategi dan arah kebijakan pemerintah kabupaten demak dan kebijakan evaluasi dan monitoring dalam peningkatan investasi asing.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.